



Published online on the page: <https://jurnal.mifandimandiri.com/index.php/learntech>

LEARNTECH Jurnal Teknologi Pendidikan

| ISSN (Online) 3108-9666 |



Analisis Komparatif Desain Pembelajaran PPKn Pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka

Intan Alfiqha^{1,*}, Patda Monicha¹, Agus Dwi Prasajo²

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

²Universitas Islam An Nur Lampung, Metro, Indonesia

Article Information

Article History:

Submit: 11 November 2025

Revision: 03 Desember 2025

Accepted: 17 Januari 2026

Published: 30 Januari 2026

Keywords

Analisis Perbandingan; Kurikulum 2013; Kurikulum Merdeka; Pembelajaran PPKn; Sekolah Dasar

Correspondence

E-mail: intanalfiqha@gmail.com*

A B S T R A K

Penelitian ini menelaah analisis komparatif desain pembelajaran PPKn pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka serta implikasinya terhadap proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di tingkat Sekolah Dasar. Kajian pustaka diterapkan sebagai pendekatan utama melalui eksplorasi buku, artikel jurnal, dan dokumen kebijakan. Pemilihan teknik ini berdasarkan pada sasaran penelitian yang menekankan analisis mendalam terhadap berbagai referensi literatur yang mengulas Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Dalam penelitian ini, berbagai sumber literatur dikumpulkan dan dievaluasi dengan teliti. Sumber tersebut mencakup buku-buku akademik yang membahas kurikulum dan pendidikan kewarganegaraan, artikel jurnal domestik maupun global yang terkait, dokumen resmi kebijakan pemerintah. Temuan analisis mengindikasikan bahwa Kurikulum 2013 menitikberatkan pada struktur kompetensi inti dan dasar serta pendekatan ilmiah, sedangkan Kurikulum Merdeka menyediakan fleksibilitas melalui capaian pembelajaran per fase, pembelajaran kontekstual, dan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila. Transformasi kurikulum tersebut juga mengubah fungsi pendidik dari penyampai materi menjadi fasilitator pembelajaran yang memotivasi partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran PPKn dalam Kurikulum Merdeka memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan karakter melalui pengalaman empirik. Kajian ini menegaskan urgensi persiapan pendidik dan institusi pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran PPKn yang kontekstual dan signifikan.

Abstract

This study examines the comparative analysis of PPKn learning design in the 2013 Curriculum and the Independent Curriculum and its implications for the learning process of Pancasila and Citizenship Education (PPKn) at the Elementary School level. A literature review was applied as the primary approach through the exploration of books, journal articles, and policy documents. The selection of this technique was based on the research objectives that emphasize in-depth analysis of various literature references reviewing the 2013 Curriculum and the Independent Curriculum. In this study, various literature sources were collected and carefully evaluated. These sources include academic books discussing curriculum and citizenship education, related domestic and global journal articles, official government policy documents. The analysis findings indicate that the 2013 Curriculum emphasizes the structure of core and basic competencies and a scientific approach, while the Independent Curriculum provides flexibility through phase-by-phase learning outcomes, contextual learning, and a project to strengthen the Pancasila Student Profile. The curriculum transformation also changes the role of educators from material deliverers to learning facilitators who motivate active student participation. The Civics (PPKn) learning process within the Independent Curriculum provides greater scope for character development through empirical experience. This study emphasizes the urgency of preparing educators and educational institutions to implement contextual and meaningful PPKn learning.

This is an open access article under the CC-BY-SA license



Published online on the page: <https://jurnal.mifandimandiri.com/index.php/leamtech>

LEARNTECH

Jurnal Teknologi Pendidikan

| ISSN (Online) 3108-9666 |



1. Pendahuluan

Kurikulum nasional Indonesia telah menjalani beberapa perubahan yang merefleksikan dinamika sosial, ekonomi, politik, serta kebutuhan perkembangan zaman. Implementasi Kurikulum 2013 (K13) sebagai perbaikan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi dan pengembangan karakter (Muktamar et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, K13 dinilai masih berfokus pada peran guru, memiliki administrasi yang rumit, serta belum memberikan ruang yang memadai bagi kreativitas guru maupun peserta didik. Permasalahan ini menunjukkan adanya keperluan untuk menghadirkan kurikulum yang lebih lentur dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Victoria et al., 2025). Untuk merespons tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan Kurikulum Merdeka pada tahun 2022 sebagai komponen dari kebijakan Merdeka Belajar.

Paradigma ini menekankan kebebasan dalam berpikir, fleksibilitas dalam pembelajaran, diferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, serta penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila. Salah satu perbedaan fundamental antara K13 dan Kurikulum Merdeka berada pada struktur kurikulum (Dwi, 2023). K13 menggunakan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD), sedangkan Kurikulum Merdeka menggunakan Capaian Pembelajaran (CP) yang lebih singkat, adaptif, dan memfasilitasi proses pembelajaran yang lebih berarti. Pada jenjang Sekolah Dasar, perubahan kurikulum ini memiliki urgensi yang sangat tinggi. Peserta didik usia SD berada pada tahap perkembangan operasional konkret, yaitu fase di mana proses belajar paling efektif terjadi melalui pengalaman langsung. Karena itu, model pembelajaran yang bersifat hafalan atau teoretis, sebagaimana masih sering muncul pada implementasi K13, kurang sesuai dengan karakteristik perkembangan siswa SD.

Kurikulum Merdeka menawarkan pendekatan berbasis proyek, eksplorasi, serta aktivitas reflektif yang lebih relevan dengan dunia anak-anak (Diana Rossa Martatiana, 2023). Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter siswa sejak dini. PPKn bukan hanya berfokus pada pengetahuan tentang kewarganegaraan, tetapi juga pembiasaan sikap demokratis, tanggung jawab, gotong royong, toleransi, serta perilaku sosial lainnya yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila (Herianto, 2020). Dengan demikian, perubahan kurikulum akan sangat memengaruhi bagaimana PPKn diajarkan, termasuk pendekatan, metode, hingga evaluasi pembelajaran. Pada penerapan K13, pembelajaran PPKn cenderung terstruktur secara ketat berdasarkan KI dan KD sehingga penilaian lebih menekankan aspek kognitif. Kurikulum Merdeka menggeser pendekatan tersebut melalui penerapan CP dan kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang menempatkan pembentukan karakter sebagai fokus utama. Perubahan paradigma ini menuntut guru untuk beralih dari peran sebagai pusat informasi menuju fasilitator pembelajaran yang menuntun peserta didik menemukan makna belajar mereka sendiri, sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan merupakan proses menuntun kekuatan kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya (Standar et al., n.d.).

Urgensi penelitian ini muncul karena banyak guru SD masih mengalami kesulitan dalam memahami perbedaan mendasar antara K13 dan Kurikulum Merdeka, terutama dalam konteks pembelajaran PPKn. Guru cenderung berfokus pada penguasaan materi akademik, sementara

integrasi nilai dan karakter ke dalam praktik pembelajaran belum optimal. Kondisi ini berpotensi menghambat tujuan pendidikan nasional yang menempatkan PPKn sebagai ruang pembentukan kepribadian dan moral peserta didik. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab masalah utama mengenai bagaimana perbedaan struktur, pendekatan, dan implementasi antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka memengaruhi pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara komprehensif kedua kurikulum tersebut, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahannya, serta mengkaji implikasi praktisnya terhadap pembelajaran PPKn. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat teoretis bagi pengembangan kajian kurikulum serta manfaat praktis bagi guru SD dalam merancang pembelajaran PPKn yang lebih relevan dan berorientasi pada pembentukan karakter.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kajian pustaka (*library research*) sebagai teknik utama. Pemilihan teknik ini berdasarkan pada sasaran penelitian yang menekankan analisis mendalam terhadap berbagai referensi literatur yang mengulas Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, khususnya dalam ranah pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Sekolah Dasar. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi, memilih, dan menelaah secara kritis berbagai bahan akademik sehingga diperoleh gambaran menyeluruh tentang evolusi kurikulum di Indonesia.

Seperti yang dikemukakan oleh Danial A. R. kajian pustaka merupakan proses terstruktur untuk mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang relevan sebagai sumber data primer. Bahan-bahan tersebut tidak hanya dibaca dan dicatat, tetapi dianalisis secara intensif sehingga mampu menghasilkan temuan yang terfokus dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di sisi lain, Zed (2008:3) menegaskan bahwa studi pustaka adalah aktivitas ilmiah yang dilakukan dengan menelusuri literatur untuk memperluas wawasan terhadap konsep, teori, dan hasil kajian yang sudah ada. Melalui aktivitas ini, peneliti dapat memetakan perkembangan gagasan, mengidentifikasi kesenjangan kajian, serta membangun kerangka konseptual yang solid.

Dalam penelitian ini, berbagai sumber literatur dikumpulkan dan dievaluasi dengan teliti. Sumber tersebut mencakup buku-buku akademik yang membahas kurikulum dan pendidikan kewarganegaraan, artikel jurnal domestik maupun global yang terkait, dokumen resmi kebijakan pemerintah seperti Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kurikulum 2013, serta Panduan Pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek (2022). Selain itu, hasil kajian sebelumnya yang menganalisis perbandingan kurikulum maupun penerapan pembelajaran PPKn juga dijadikan bahan pertimbangan krusial.

Pelaksanaan penelitian ini tidak dibatasi oleh tempat tertentu karena seluruh data diperoleh melalui penelusuran dokumen dan literatur, baik melalui perpustakaan fisik maupun platform daring seperti Google Scholar, Garuda, DOAJ, dan repositori universitas. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu yang adaptif, disesuaikan dengan keperluan penelusuran dan penggalian sumber-sumber yang ada.

Sasaran penelitian ini bukan berupa individu atau kelompok spesifik, tetapi berupa dokumen dan literatur yang relevan. Dengan demikian, subjek penelitian merupakan bahan pustaka yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, dan pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar. Pemilihan sumber dilakukan melalui proses seleksi rigor dengan mempertimbangkan tingkat kepercayaan, tahun publikasi, kesesuaian topik, serta kontribusinya terhadap analisis penelitian.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengumpulan data melalui penelusuran referensi (Sari et al., 2022). Langkah kedua adalah kategorisasi sumber berdasarkan topik, seperti prinsip kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi,

dan penerapan pada mata pelajaran PPKn. Langkah ketiga adalah membaca dan menganalisis isi sumber secara kritis untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan ciri khas masing-masing kurikulum. Langkah terakhir adalah melakukan interpretasi serta menyusun sintesis hasil analisis untuk menghasilkan pemahaman baru mengenai arah perkembangan kurikulum dan dampaknya terhadap pembelajaran PPKn.

Instrumen dalam kajian pustaka berupa lembar pencatatan data dan panduan analisis literatur yang digunakan untuk mengorganisir informasi yang ditemukan (Agustianti et al., 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur, sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang memfokuskan pada penelaahan makna, struktur, dan konteks informasi dalam sumber tertulis. Melalui teknik ini, peneliti dapat menilai relevansi, konsistensi, dan kontribusi setiap sumber dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Dengan demikian, metode penelitian ini memberikan fondasi yang kokoh dan terarah untuk mengkaji perbedaan esensial antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, serta menggambarkan implikasinya bagi pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar. Hasil analisis tidak dimaksudkan untuk menggantikan temuan sebelumnya, tetapi memberikan perspektif baru yang memperkaya wacana akademik mengenai kebijakan kurikulum di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan terdiri atas beberapa bagian yang menjelaskan landasan filosofis dan paradigma pendidikan, struktur dan pendekatan pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar. Bagian pertama mengenai landasan filosofis dan paradigma pendidikan menjelaskan bahwa landasan filosofis merupakan dasar berpikir yang menjadi arah, tujuan, dan roh dari seluruh kegiatan pendidikan. Filsafat pendidikan menentukan bagaimana manusia dipandang dalam proses belajar, bagaimana guru berperan, serta nilai-nilai apa yang hendak ditanamkan melalui kurikulum.

Dalam konteks sistem pendidikan nasional Indonesia, landasan filosofis pendidikan berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-undang et al., n.d.). Menurut Ki Hajar Dewantara, filsafat pendidikan Indonesia berlandaskan pada prinsip “ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”, yang berarti di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menegaskan bahwa pendidikan harus memerdekakan manusia, bukan mengekang. Peserta didik harus dipandang sebagai individu yang memiliki potensi kodrati untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan keunikan dan fitrahnya. Inilah yang menjadi dasar munculnya paradigma pendidikan Merdeka Belajar, yang berorientasi pada kebebasan berpikir dan pengembangan diri peserta didik secara utuh.

Dalam filsafat pendidikan modern, terdapat beberapa aliran yang berpengaruh terhadap sistem pendidikan di Indonesia, khususnya dalam pembentukan kurikulum, yaitu esensialisme, progresivisme, humanisme, dan konstruktivisme (Fadil Yudia Fauzi, I. A. (2013). Aliran esensialisme menekankan bahwa tujuan utama pendidikan adalah menanamkan nilai-nilai dan pengetahuan dasar yang dianggap esensial bagi kehidupan manusia (A., Ulum, et al., 2024). Pendidikan harus berorientasi pada warisan budaya, moral, dan intelektual yang telah teruji oleh waktu. Dalam konteks Kurikulum 2013, nilai-nilai esensialisme tampak pada struktur Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang bersifat nasional dan seragam. Guru berperan sebagai penyampai pengetahuan, sedangkan siswa diarahkan untuk memahami dan menguasai konsep yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Aliran progresivisme muncul sebagai reaksi terhadap pendidikan yang kaku dan berpusat pada guru.

Filsafat ini berpandangan bahwa pendidikan harus dinamis, fleksibel, dan berorientasi pada kebutuhan serta minat peserta didik. Menurut John Dewey (1938), pengalaman adalah inti dari proses belajar. Siswa belajar secara efektif apabila mereka terlibat langsung dalam kegiatan yang bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata (Ervina, R., dkk. (2022). Konsep ini mulai diadaptasi dalam Kurikulum 2013, namun semakin kuat diimplementasikan dalam Kurikulum Merdeka, yang menekankan pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning) dan pengalaman nyata. Dengan paradigma progresivisme, pembelajaran PPKn tidak hanya sebatas pemahaman konsep kewarganegaraan, tetapi juga melibatkan aktivitas sosial yang melatih tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian terhadap sesama. Filsafat humanisme memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi unik, martabat, dan kebebasan untuk berkembang.

Pendidikan berfungsi membantu individu mengaktualisasikan potensinya secara optimal. Menurut Maslow (1970) dalam teori hierarki kebutuhan, seseorang baru dapat belajar dengan baik apabila kebutuhan dasarnya terpenuhi baik kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, maupun penghargaan diri (Standar et al., n.d.). Humanisme menjadi landasan utama Kurikulum Merdeka, di mana setiap peserta didik diperlakukan sebagai individu yang unik dengan kemampuan dan gaya belajar berbeda. Pembelajaran tidak lagi bersifat seragam, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi peserta didik melalui pendekatan *differentiated learning*. Dalam pembelajaran PPKn, pendekatan humanistik diwujudkan melalui kegiatan yang menumbuhkan empati, gotong royong, dan penghargaan terhadap perbedaan, sesuai dengan semangat Pancasila. Aliran konstruktivisme berpendapat bahwa pengetahuan tidak diberikan secara langsung oleh guru, melainkan dibangun oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan pengalaman pribadi. Vygotsky (1978) menjelaskan bahwa pembelajaran akan lebih bermakna jika peserta didik aktif membangun pemahamannya sendiri melalui bimbingan guru dan kerja sama dengan teman sebaya (*scaffolding*). Paradigma konstruktivisme ini menjadi pondasi dari pembelajaran aktif (*active learning*) yang digunakan dalam Kurikulum Merdeka. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan makna dan konsep melalui pengalaman konkret. Dalam pembelajaran PPKn, misalnya, siswa tidak hanya membaca tentang demokrasi, tetapi juga dilibatkan dalam kegiatan simulasi pemilihan ketua kelas atau diskusi kelompok untuk menginternalisasi nilai-nilai demokratis secara langsung. Paradigma pendidikan Indonesia modern bergerak dari *teacher-centered learning* menuju *student-centered learning*.

Pergeseran paradigma ini sejalan dengan semangat Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Nadiem Makarim (2020). Konsep ini berpijak pada keyakinan bahwa setiap anak memiliki potensi luar biasa yang dapat berkembang apabila diberi kebebasan dan kesempatan untuk belajar sesuai minat serta kemampuannya. Pendidikan tidak boleh mengekang, melainkan harus menuntun dan memerdekakan. Filosofi ini sejalan dengan gagasan Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas pendidik bukanlah mengisi kepala anak dengan pengetahuan, melainkan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak agar tumbuh sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya bangsa. Dalam konteks pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar, paradigma ini diterjemahkan melalui kegiatan belajar yang berbasis pada pengalaman sosial, seperti kerja kelompok, proyek sosial, dan refleksi nilai Pancasila.

Pada bagian berikutnya mengenai struktur dan pendekatan pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar dijelaskan bahwa struktur kurikulum memiliki peran penting dalam mengarahkan proses pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks Sekolah Dasar, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menempati posisi yang sangat strategis karena berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter, moral, dan nilai-nilai kebangsaan peserta didik sejak dini. Oleh karena itu, baik Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka sama-sama menempatkan PPKn sebagai mata pelajaran wajib yang tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga pembiasaan sikap dan perilaku berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Pada Kurikulum 2013, struktur pembelajaran PPKn diatur berdasarkan empat kompetensi inti yang mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Keempat aspek tersebut menjadi kerangka dasar dalam pengembangan kompetensi dasar (Tusyana Ulum Fatimatul Markhumah, 2021). Kurikulum 2013 mengusung pendekatan ilmiah atau *scientific approach* yang meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Sebagai penyempurnaan, Kurikulum Merdeka memperkenalkan Capaian Pembelajaran (CP) per fase (A, B, C) dengan fleksibilitas yang lebih tinggi. Guru diberi kebebasan menentukan kedalaman materi serta metode pembelajaran. P5 menjadi bagian integral pembelajaran untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila melalui proyek nyata seperti pameran budaya atau kegiatan gotong royong. Pendekatan kontekstual, proyek, dan refleksi menjadi ciri utama pembelajaran Kurikulum Merdeka. Pembelajaran diarahkan agar siswa mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Misalnya, proyek “Demokrasi di Sekolah” melalui simulasi pemilihan ketua kelas.

Implementasi pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar dijelaskan sebagai proses penerapan nilai-nilai dasar kebangsaan, moral, dan sosial ke dalam kegiatan belajar mengajar (Sitinjak, et al., 2024). PPKn memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik agar menjadi warga negara yang beriman, berakhlak mulia, disiplin, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan bangsa. Implementasi pembelajaran PPKn tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, implementasi pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar tidak terlepas dari dinamika perubahan kurikulum nasional. Pada masa Kurikulum 2013, PPKn diajarkan dengan menggunakan pendekatan tematik integratif.

Materi PPKn tidak berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan dengan mata pelajaran lain dalam tema tertentu. Pendekatan ini dimaksudkan agar siswa memahami nilai-nilai kewarganegaraan secara kontekstual dan terhubung dengan pengalaman kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam tema “Lingkungan Bersih dan Sehat”, nilai-nilai seperti tanggung jawab, disiplin, dan gotong royong dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran lintas mata pelajaran. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mengenal konsep moral, tetapi juga menginternalisasikannya melalui tindakan langsung. Implementasi Kurikulum 2013 di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Banyak guru yang masih memahami pembelajaran PPKn secara konvensional, yaitu sebatas penyampaian materi dan hafalan konsep. Akibatnya, pembelajaran cenderung bersifat kognitif dan kurang menyentuh ranah afektif serta psikomotorik siswa. Selain itu, pendekatan ilmiah yang diterapkan sering kali sulit dijalankan secara menyeluruh karena keterbatasan waktu, sarana, dan kemampuan guru dalam merancang kegiatan belajar yang interaktif. Evaluasi belajar pun lebih banyak berorientasi pada penilaian hasil belajar kognitif daripada proses pembentukan karakter. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Kegiatan intrakurikuler berlangsung di dalam kelas melalui pembelajaran formal PPKn, sementara kegiatan kokurikuler diwujudkan melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

Melalui proyek ini, siswa diajak untuk mengalami, merasakan, dan mempraktikkan nilai-nilai kebangsaan secara nyata. Dalam konteks pembelajaran, guru PPKn berperan sebagai fasilitator, pembimbing, sekaligus teladan bagi siswa. Guru tidak lagi hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menuntun peserta didik untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan melalui tindakan konkret. Misalnya, ketika membahas topik tentang “hak dan kewajiban”, guru dapat memberikan contoh nyata seperti membagi tugas kebersihan kelas, berdiskusi tentang aturan sekolah, dan merefleksikan pentingnya melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak. Dengan metode seperti ini, pembelajaran menjadi lebih hidup, dialogis, dan relevan dengan pengalaman anak. Implementasi pembelajaran PPKn di Kurikulum Merdeka mengedepankan prinsip diferensiasi atau pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi siswa. Guru dapat menggunakan

berbagai metode seperti diskusi kelompok, bermain peran, studi kasus, simulasi, atau kunjungan lapangan. Pendekatan semacam ini menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan empati antarindividu.

Misalnya, melalui kegiatan simulasi musyawarah kelas, siswa belajar tentang nilai demokrasi dan pentingnya menghormati pendapat orang lain. Kurikulum Merdeka menekankan penilaian formatif dan reflektif, yang lebih berfokus pada proses belajar dan perkembangan karakter siswa. Penilaian tidak hanya dilakukan melalui tes tertulis, tetapi juga melalui observasi sikap, jurnal refleksi, dan portofolio kegiatan. Guru dapat menilai bagaimana siswa menunjukkan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama selama proses belajar berlangsung. Dengan demikian, evaluasi dalam pembelajaran PPKn menjadi lebih holistik, mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang.

Bagian terakhir mengenai evaluasi dan asesmen pembelajaran menjelaskan bahwa evaluasi dan asesmen merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran karena berfungsi menilai sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Sekolah Dasar, evaluasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil belajar kognitif, tetapi juga harus mencakup perkembangan sikap, nilai, dan keterampilan sosial peserta didik. Hal ini sejalan dengan hakikat PPKn sebagai mata pelajaran yang bertujuan membentuk karakter warga negara yang berakhlak mulia, demokratis, dan berjiwa Pancasila. Oleh karena itu, sistem evaluasi dalam PPKn perlu dirancang secara menyeluruh, berimbang, dan mencerminkan proses pembelajaran yang sebenarnya terjadi di kelas maupun di lingkungan sekolah. Dalam Kurikulum 2013, evaluasi pembelajaran dikenal dengan istilah penilaian autentik (*authentic assessment*).

Menurut Hosnan (2014), penilaian autentik merupakan proses pengumpulan data yang menggambarkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam konteks yang sesungguhnya. Artinya, penilaian tidak hanya dilakukan melalui tes tertulis, tetapi juga melalui pengamatan perilaku, portofolio, penugasan, dan penilaian proyek. Dalam mata pelajaran PPKn, penilaian autentik digunakan untuk menilai sikap spiritual dan sosial siswa, keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan mereka dalam menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Guru dalam Kurikulum 2013 diharapkan mampu menilai ketiga ranah utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, secara seimbang. Ranah sikap diukur melalui observasi perilaku, jurnal refleksi, dan penilaian antar teman; ranah pengetahuan diukur melalui tes lisan atau tertulis; sedangkan ranah keterampilan diukur melalui kinerja nyata siswa seperti presentasi, diskusi, dan kegiatan kelompok (Suryana & Ismi, 2019).

Dengan sistem ini, guru dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang karakter dan kemampuan siswa. Kurikulum Merdeka hadir dengan sistem evaluasi yang lebih sederhana, fleksibel, dan bermakna. Kurikulum ini tidak lagi menggunakan istilah kompetensi inti dan dasar, melainkan menggunakan Capaian Pembelajaran (CP) yang dirancang berdasarkan fase perkembangan siswa. Evaluasi pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka menekankan dua pendekatan utama, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Sementara penilaian sumatif dilakukan pada akhir satu periode pembelajaran untuk menilai pencapaian akhir siswa terhadap capaian pembelajaran. Penilaian formatif dapat dilakukan melalui observasi kegiatan siswa saat berdiskusi, menanggapi isu sosial, atau melaksanakan proyek kebinekaan.

Guru memberikan umpan balik yang mendorong siswa untuk merefleksikan nilai-nilai yang telah mereka praktikkan. Sementara penilaian sumatif dapat berbentuk laporan hasil proyek, portofolio karya, atau refleksi tertulis yang menunjukkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan (Uzer, 2000). Dengan demikian, penilaian dalam Kurikulum Merdeka

tidak hanya mengukur “apa yang diketahui siswa”, tetapi juga “bagaimana siswa berpikir dan bertindak” dalam kehidupan nyata. Evaluasi pembelajaran PPKn dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik. Guru dapat memanfaatkan observasi partisipatif, yaitu dengan mencatat perilaku siswa selama kegiatan belajar, seperti cara mereka bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, atau menunjukkan kepedulian terhadap teman. Selain itu, guru juga dapat menggunakan penilaian diri (*self-assessment*), di mana siswa diajak untuk menilai perilaku dan sikap mereka sendiri berdasarkan kriteria tertentu.

Temuan dan pembahasan dapat disajikan dalam satu bagian (sebagai bagian 'temuan dan pembahasan') atau dua bagian terpisah (sebagai 'subjudul temuan' dan 'subjudul pembahasan'). Temuan adalah penyajian penelitian yang murni berdasarkan data yang dianalisis, sedangkan pembahasan adalah penjelasan temuan yang relevan dengan literatur yang dibahas dalam pendahuluan dan teori serta gagasan relevan lainnya. Penulis diharuskan untuk memberikan temuan dan pembahasan pada urutan yang sama dengan tujuan penelitian, dan juga harus memberikan ringkasan pembahasan yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan besar penelitian di akhir bagian pembahasan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perubahan dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka membawa dampak signifikan terhadap paradigma dan praktik pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Sekolah Dasar. Kurikulum 2013 menekankan pada pembentukan kompetensi dasar melalui pendekatan ilmiah dan penilaian autentik yang berorientasi pada keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Sementara itu, Kurikulum Merdeka hadir dengan paradigma baru yang lebih fleksibel, humanistik, dan berpusat pada peserta didik. Temuan analisis mengindikasikan bahwa Kurikulum 2013 menitikberatkan pada struktur kompetensi inti dan dasar serta pendekatan ilmiah, sedangkan Kurikulum Merdeka menyediakan fleksibilitas melalui capaian pembelajaran per fase, pembelajaran kontekstual, dan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila. Transformasi kurikulum tersebut juga mengubah fungsi pendidik dari penyampai materi menjadi fasilitator pembelajaran yang memotivasi partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran PPKn dalam Kurikulum Merdeka memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan karakter melalui pengalaman empirik. Kajian ini menegaskan urgensi persiapan pendidik dan institusi pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran PPKn yang kontekstual dan signifikan. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan yang lebih luas bagi guru dalam merancang pembelajaran sesuai karakteristik siswa dan konteks sekolah. Pembelajaran PPKn tidak lagi sekadar menyampaikan konsep-konsep kewarganegaraan, tetapi berfokus pada internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pengalaman belajar yang kontekstual, reflektif, dan berbasis proyek. Melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), peserta didik diajak untuk mengamalkan nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, tanggung jawab, dan kebinekaan dalam kegiatan nyata di sekolah dan masyarakat. Secara filosofis, Kurikulum Merdeka mengembalikan semangat pendidikan Indonesia kepada hakikat pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam konteks PPKn, hal ini berarti guru berperan sebagai penuntun yang membantu siswa memahami dan mengamalkan nilai kebangsaan. Implementasi Kurikulum Merdeka juga menghadapi tantangan nyata seperti kesiapan guru, sarana prasarana, dan pemahaman konsep. Oleh karena itu, keberhasilannya memerlukan dukungan dari seluruh komponen pendidikan.

Daftar Pustaka

- A., Ulum, N., Hasanah, U., & Kasdriyanto, D. Y. (2024). Meningkatkan Hasil Belajar PKN Menggunakan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Kelas VII MTs Raudlatul Hasaniyah Tahun Ajaran 2023 - 2024. 2(1), 96-105.
- Agustianti, R., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., & Ikhrum, F. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. TOHAR MEDIA.

- Ahmad Mukhtar, Y. I. (2024). Analisis Perbandingan Efektivitas Penerapan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 130-143.
- Diana Rossa Martatiyana, A. D. (2023). Analisis Komparasi Implementasi Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013. *Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 96-109. <https://doi.org/10.31602/muallimuna.v9i1.11600>
- Dwi, S. (2023). Analisis Perbandingan Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di SD Negeri 6 Pangkalpinang. *Edois: Jurnal of Islamic Education*, 1(2), 59-72. <https://doi.org/10.32923/edois.v1i02.3691>
- Ervina, R., Pradana, A. B. A., & Meinita, P. (2022). Pengaruh Model Project based Learning (PJBL) dengan Media Scrapbook terhadap Hasil Belajar PPKn (Penelitian Pada Siswa Kelas 3 SD Negeri Podosoko I). *Prosiding University Research Colloquium*, 344-354. Retrieved from <https://www.repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/2160>
- Fadil Yudia Fauzi, I. A. (2013). Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Upaya Pembentukan Karakter Peserta Didik. *JURNAL PPKN UNJ ONLINE*, 1-15.
- Herianto, E. (2020). *Evaluasi Pembelajaran PPKn*. Yayasan Nusatenggara Centre Mataram: Nusa Tenggara Barat.
- M. T., Sitingjak, I. Y., Gultom, S., & Saragih, K. W. (2024). Kepemimpinan Sekolah Penentu Karakter Peserta Didik Peran Guru dalam Membentuk Karakter Siswa melalui Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar untuk Menghadapi Tantangan Society 5.0. *Jurnal Pendidikan: Kajian dan Implementasi*. 5(3), 42-62.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. UNISMA PRESS.
- Standar, B., Pendidikan, D. A. N. A., & Sapei, M. (n.d.). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Suryana, Y., & Ismi, F. M. (2019). Manajemen Kurikulum Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan. *Jurnal Isema: Islamic Educational Management*, 4(2), 257-266. <https://doi.org/10.15575/isema.v4i2.6026>
- Tusyana Ulum Fatimatul Markhumah, E. (2021). Implementasi Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013 dengan Pendekatan Saintifik Tema III Peduli Terhadap Makhluk Hidup. *In Jurnal Kependidikan* (Vol. 13, Issue 1). <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/AI-Riwayah>
- Undang-undang, D., Pancasila, P., Studi, K., & Judul, I. (n.d.). Hak Cipta © 2017 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. -- Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. Untuk SMA / MA / SMK / MAK Kelas XI ISBN 978-602-427-090-2 (jilid lengkap) ISBN 978-602-427-092-6 (jilid 2) II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Uzer, M. (2000). *Menjadi Guru Profesional*. Remaja Rosda Karya.
- Victoria, N., Charolin, M., Sihombing, B., Br, L., & Rekha, I. (2025). *Analisis Perbandingan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka terhadap Pembentukan Moralitas Generasi Z dalam Konteks Pendidikan Nasional*.